

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang Perusahaan

PT. Adhi Karya adalah sebuah perusahaan Indonesia yang bergerak dalam jasa konstruksi, pembangunan infrastruktur, properti, real estate dan Engineering, Procurement and Construction (EPC). Proyek infrastruktur yang dikerjakan mencakup jalan, jembatan, saluran irigasi, pembangkit listrik dan pelabuhan, sementara proyek-proyek konstruksi bangunannya mencakup gedung pencakar langit, hotel, rumah sakit dan sekolah.

Perusahaan ini telah eksis sejak masa pendudukan Belanda di Indonesia dengan nama NV Architecten-Ingenieurs en Aannemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries (NV Associatie). Pada tahun 1958, perusahaan ini resmi diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, dan pada tanggal 11 Maret 1960, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga mengubah nama perusahaan ini menjadi Perusahaan Bangunan Adhi Karya. Pada bulan Maret 1961, perusahaan ini ditetapkan menjadi sebuah perusahaan negara (PN), dan pada tahun 1971, status perusahaan ini resmi diubah menjadi persero. Pada tahun 2004, perusahaan ini menjadi perusahaan konstruksi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia.

Dalam meningkatkan daya saing, PT. Adhi Karya mempersiapkan perbaikan di berbagai aspek termasuk penguatan organisasi dan peningkatan kapasitas internal Perseroan. Berbekal optimisme bahwa peluang baik yang tidak terbatas terus menanti di masa mendatang, PT. Adhi Karya siap untuk senantiasa berkarya melalui:

- a) Memaksimalkan kinerja dengan menanamkan nilai-nilai Perseroan (Corporate Value) secara terpadu (incorporated).
- b) Melakukan proses pembelajaran dalam rangka mencapai pertumbuhan.
- c) Menerapkan budaya perusahaan yang sederhana dan membumi.
- d) Proaktif menjalankan lima lini bisnis secara profesional, sesuai tata kelola yang baik dan mendukung pertumbuhan perusahaan.

- e) Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Social Responsibility (CSR) seiring pertumbuhan perusahaan.

Berperan sebagai kontraktor pelaksana pada proyek Pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh). PT. Adhi Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab secara langsung pada pemilik proyek (*owner*) yakni PT. Hutama Karya (Persero) dan dalam melaksanakan pekerjaannya diawasi oleh tim pengawas dari PT. Wahana Mitra KSO dan PT. Hi – Way Indotek serta dapat berkonsultasi secara langsung dengan tim pengawas terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan. Perubahan desain harus segera dikonsultasikan sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh merupakan proyek strategis nasional. Proyek Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie-Provinsi Aceh, yang terdiri 6 ruas bagian pekerjaan diantaranya :

1. Seksi 1 (Sta. 00+00 s/d Sta. 24+670) : Padang tiji – Seulimum
2. Seksi 2 (Sta. 24+670 s/d Sta. 30+930) : Seulimum – Jantho
3. Seksi 3 (Sta. 30+930 s/d Sta. 47+300) : Jantho – Indrapuri
4. Seksi 4 (Sta. 47+300 s/d Sta. 61+900) : Indrapuri – Blang Bintang
5. Seksi 5 (Sta. 61+900 s/d Sta. 69+200) : Blang Bintang – Kuta baro
6. Seksi 6 (Sta. 69+200 s/d Sta. 74+214) : Kuta baro – Baitussalam

Seiring berjalannya proyek Seksi 1 dibagi menjadi dua seksi, yaitu :

1. Seksi 1B (Sta. 00+000 s/d Sta. 09+250)
2. Seksi 1A (Sta. 09+250 s/d Sta. 24+670)

Pada proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli – Banda Aceh bagian Seksi 1A terdapat berbagai bangunan struktur diantaranya jembatan overpass, main brigde, box underpass dan box culvert, serta main road dengan panjang 15,42 km. Konfigurasi Jalan Tol Ruas Sigli – Banda Aceh adalah 2 Jalur 4 Lajur lalu lintas dengan jenis perkerasan kaku (*rigid pavement*) memiliki lebar lajur 3,6 m, lebar bahu dalam 1,5 m, bahu luar 3 m, median jalan sebesar 2,5 m, dan bahu yang diaspal sebesar 2,5 m.

1.2 Tujuan Proyek

Indonesia adalah negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi 5,03 % tercatat 2023 dan laju pertumbuhan penduduk 1,17 % menurut data BPS tahun 2022. Pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, salah satunya dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan tol yang akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengurangi kesenjangan regional dan memperbaiki aksesibilitas masyarakat terhadap layanan public.

Melihat kondisi geografis dari Sigli-Banda Aceh pemerintah melakukan kajian tentang ide pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh. Jika hasil tinjauan studi kelayakan komersial sebuah jalan termasuk kategori tidak layak, maka inisiasi dan usaha pembangunannya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN, sebagai perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah menugaskan PT. Hutama Karya (Persero) sebagai BUMN (owner) yang membangun jalan tol Sibanceh.

Hasil analisis pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh menyatakan bahwa proyek ini tidak komersial secara finansial tetapi manfaat dan kepentingan strategisnya ditujukan untuk kepentingan orang banyak, atau termasuk dalam kategori “menguasai hajat hidup orang banyak”.

Secara singkat, dampak ekonomi dan sosial yang menjadi tujuan pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh bagi Sumatera, dan Aceh pada khususnya, adalah sebagai berikut:

- a) Menghemat biaya logistik dengan memangkas waktu tempuh perjalanan. Sebelum ada jalan tol, untuk mencapai Banda Aceh dari Sigli membutuhkan waktu 2-3 jam. Jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh dapat mempersingkat waktu tempuh kedua kota menjadi hanya satu jam.
- b) Infrastruktur akan menumbuhkan titik-titik ekonomi baru. Pertumbuhan ekonomi dari satu titik ke titik yang lain akan terhubung dan saling memengaruhi. Ada usaha-usaha baru dan perluasan usaha, sehingga dapat membangkitkan perekonomian di Aceh. Pertumbuhan ekonomi di Aceh

akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Akibatnya, lapangan kerja baru banyak tercipta.

- c) Konektivitas jalan dari Medan hingga Banda Aceh mengalami peningkatan. Jaringan jalan antara Banda Aceh hingga Medan sudah mendekati volume maksimum. Sebagai langkah antisipasi dalam mengakomodasi lalu lintas yang ada, maka dilakukan pengembangan jaringan jalan antara Banda Aceh dan Medan. Jaringan jalan tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan industri di Pulau Sumatera.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan/Industri

Organisasi dalam suatu proyek konstruksi merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam mengelola dan mengontrol jalannya pelaksanaan proyek. Struktur organisasi adalah sebuah rencana suatu organisasi dalam mengatur sumber daya yang terkait didalamnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi memberi kemudahan kepada tim dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki beserta penanggung jawabnya. Keberhasilan organisasi mengarah kepada pola pengembangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi, dimana dalam perencanaannya harus disusun secara tepat dalam mewujudkan kinerja perusahaan sebagai tujuan dalam organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan, karakteristik dari suatu organisasi yaitu terdiri dari kumpulan orang-orang yang membentuk kerja sama dengan tujuan yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang berlandaskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Dalam sebuah proyek, terdapat 4 unsur penting agar proyek dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- a. Pemilik Proyek (*Owner*)
- b. Perencana (*consultan/designer*)
- c. Pengawas (*direksi/supervisor*)
- d. Pelaksana (*contractor*)

Semua unsur-unsur organisasi tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tetapi dalam pelaksanaannya unsur-unsur tersebut saling terkait

dan bergantung satu sama lainnya, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan akan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya.

Berikut ini merupakan Bagan Struktur Organisasi proyek yang terlibat dalam proyek Pembangunan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh seksi 1 Padang Tiji – Seulimuem.

a. Pemilik Proyek (*Owner*)

Pemilik proyek (pemberi tugas atau pengguna jasa) adalah orang/badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan membayar biaya pekerjaan tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, badan/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta.

Hak dan kewajiban pengguna jasa (sumber : Buku Manajemen Proyek Konstruksi disusun oleh Wulfram I. Ervianto) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor).
2. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa.
3. Memberikan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan.
4. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan.
5. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan.
6. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik.
7. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Pimpinan Pelaksana Kegiatan pada Pembangunan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh adalah PT Utama Karya.

b. Perencana (*Consultan/Designer*)

Perencana (*consultan/designer*) adalah pihak perorangan atau badan hukum yang menerima tugas dari Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK) untuk melaksanakan pekerjaan perencana/perancangan (*design*) dan memberikan saran-saran yang perlu dalam perencanaan / pelaksanaan proyek.

Hak dan kewajiban konsultan perencana (sumber : Buku Manajemen Proyek Konstruksi disusun oleh Wulfram I. Ervianto) adalah sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat, hitungan struktur, rencana anggaran biaya.
2. Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pemilik proyek dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan.
3. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat.
4. Membuat gambar revisi apabila terjadi perubahan perencanaan.
5. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek.

Perencana (*consultan/designer*) pada Pembangunan Jalan Sigli – Banda Aceh seksi 1 Padang Tiji - Seulimuem adalah PT Wiratman.

c. Pengawas (Direksi/Supervisor)

Konsultan pengawas (*direksi/supervisor*) adalah pihak perorangan atau badan hukum yang ditunjuk dan diberi kuasa penuh oleh pemilik proyek untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pengawasan dan pengontrolan dilakukan agar tercapai hasil kerja sesuai dengan persyaratan yang ada.

Adanya pengawasan dari direksi diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil sesuai perencanaan yang diharapkan. Tugas dan tanggung jawab pengawas (*direksi*) (sumber : Buku Manajemen Proyek Konstruksi disusun oleh Wulfram I. Ervianto) adalah sebagai berikut :

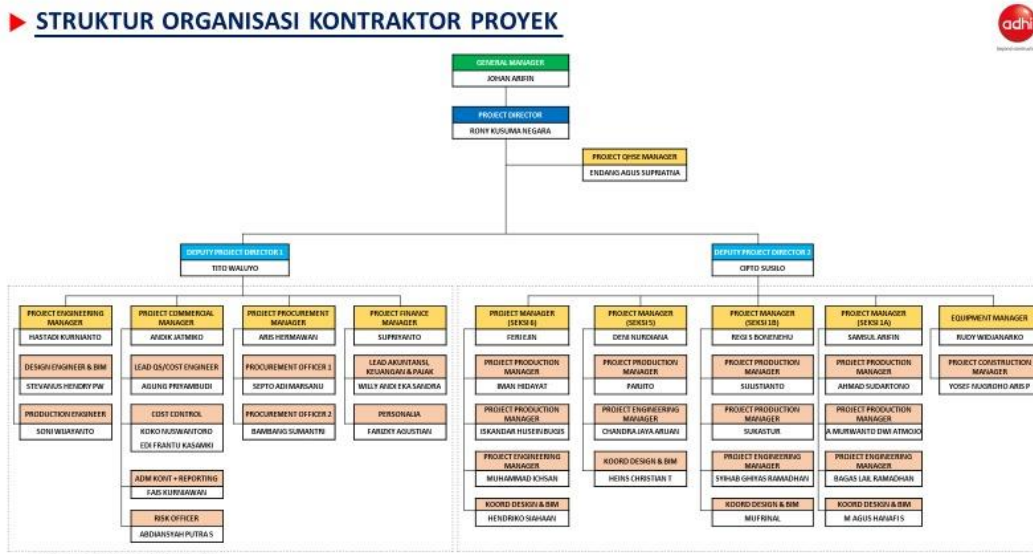
1. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan.
2. Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan.
4. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar.
5. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.
6. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.
7. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor.
8. Menghentikan sementara apabila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
9. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan).
10. Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan bertambah atau berkurangnya pekerjaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas atau direksi bertanggung jawab kepada pemimpin proyek. Pengawas berhak memberikan saran dan petunjuk kepada pelaksana (pemborong/kontraktor) jika dirasakan perlu, agar waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama di dalam RKS.

Pengawas (*direksi/supervisor*) pada Pembangunan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh seksi 1 Padang Tiji - Seulimuem adalah PT Wahana Mitra KSO dan PT. Hi-Way Indotek Konsultan.

d. Pelaksana (*Contractor*)

Pelaksana (*contractor*) adalah pihak perorangan atau badan hukum yang menerima pekerjaan, yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan biaya yang ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kontraktor juga harus memiliki usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi sesuai dengan keahlian dan kemampuannya serta mempunyai tenaga ahli teknik dan sarana peralatan yang cukup. Struktur organisasi kontraktor pelaksana dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kontraktor Pelaksana
 Sumber: Data Proyek, 2023

Tugas dan tanggung jawab pelaksana (*contractor*) (sumber : Buku Manajemen Proyek Konstruksi disusun oleh Wulfram I. Ervianto) adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan sarana penunjang untuk kelancaran kerja.

2. Menyediakan dan mempersiapkan perlengkapan bahan yang akan digunakan pada proyek sesuai dengan persyaratan bestek.
3. Menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman serta peralatan yang diperlukan pada saat pelaksanaan pekerjaan.
4. Melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan gambar bestek dan memenuhi peraturan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
5. Menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan dalam kontrak.
6. Mengadakan pemeliharaan selama proyek tersebut masih dalam tanggung jawab pelaksana.
7. Bertanggung jawab terhadap fisik bangunan selama masa pemeliharaan.

Pelaksana (*contractor*) pada Pembangunan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Fungsi dan peranan tiap unsur-unsur dalam struktur organisasi pelaksana/kontraktor dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut :

1. *General Manager*, adalah orang yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian/fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi.
2. *General Superintendent*, merupakan unit organisasi kontraktor pelaksana berada di lapangan. *General superintendent* merupakan wakil mutlak dari perusahaan yang bertugas mengkoordinir seluruh pelaksanaan pekerjaan di lapangan, bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan proyek dari awal sampai selesai dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
3. *Superintendent*, bertanggung jawab dalam mengkoordinir proyek dari awal sampai selesai dan mengambil keputusan yang berkenaan dengan proyek atas persetujuan *general superintendent*.

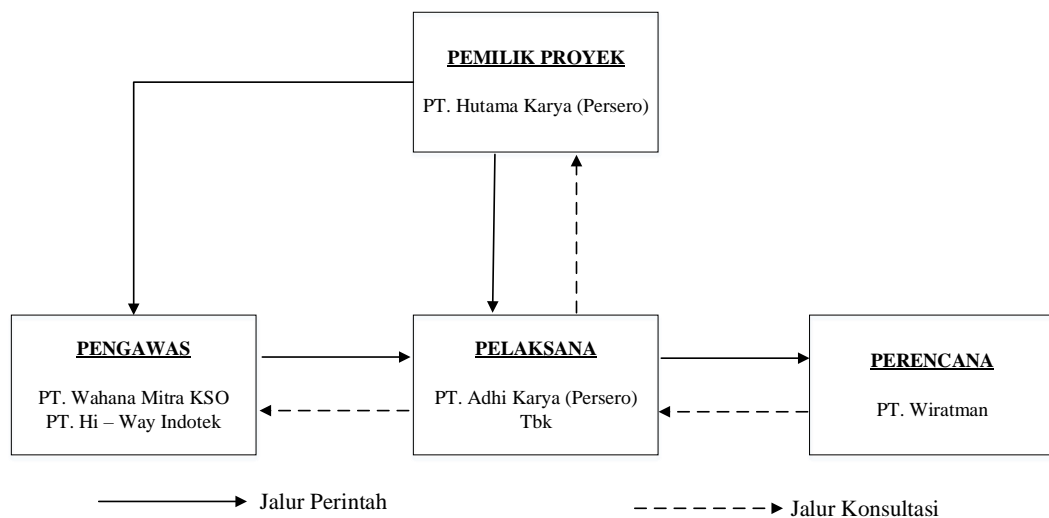
4. *Quality Control (QC)*, orang yang bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas dalam produk dan jasa perusahaannya. Dan memeriksa secara visual dan menguji suatu pekerjaan.
5. *HSE Supervisor*, orang yang membuat dan menerapkan sebuah sistem manajemen sebuah organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran dan visinya lebih fokus dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan.
6. *Project Engineering Manager*, orang yang bertanggung jawab untuk memastikan selesai dengan rencana awalnya.
7. *Project Commercial Manager*, adalah orang yang bertanggung jawab atas manajemen komersil dan biaya proyek.
8. *Project Procurement Manager*, orang yang bertugas untuk memajemen proses-proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan proyek dari luar organisasi.
9. *Project Finance Manager*, orang yang bertugas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi di lapangan, membuat laporan keuangan mengenai seluruh pengeluaran proyek dan membuat secara rinci pembukuan keuangan proyek
10. *Project Construction Manager*, orang yang bertanggung jawab agar proyek berjalan sesuai rencana dan memastikan penyelesaian proyek berdasarkan anggaran dan waktu yang disepakati.
11. *Site Engineering Manager*, membantu tugas manager proyek yang memiliki tugas dalam perencanaan teknis dan material yang meliputi menyediakan seluruh shop drawing, membuat perhitungan kontruksi yang diperlukan, menentukan spesifikasi data teknis bahan dan volume pekerjaan.
12. *Quantity Surveyor (QS)*, bertanggung jawab tentang manajemen proyek yang meliputi manajemen biaya dan manajemen kontrak dalam suatu proyek konstruksi.
13. *Safety Patrol*, orang yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan.

14. *Surveyor*, bertanggung jawab atas ketepatan pengukuran di lapangan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang di tetapkan.
15. *Mechanic*, bagian yang bertugas memonitor mesin dan alat alat yang digunakan dalam proyek.

1.4 Hubungan Kerja antara Unsur-unsur Organisasi Proyek

Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan proyek, hubungan kerja antara unsur-unsur dari organisasi yang terlibat dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu secara teknis dan secara hukum.

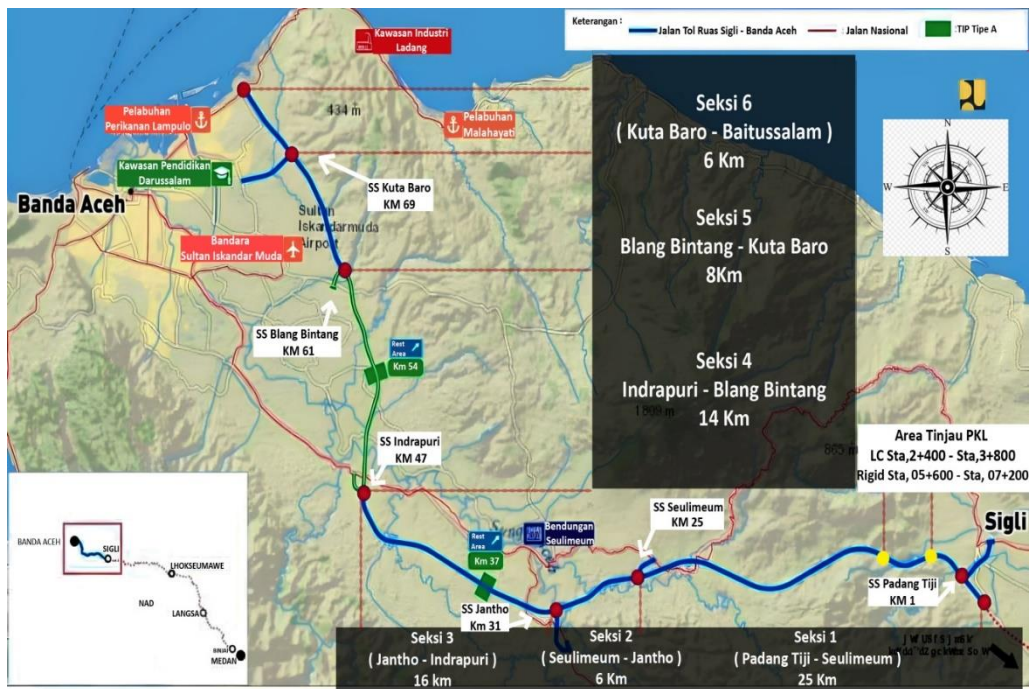
Hubungan kerja secara teknis merupakan suatu hubungan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek. Dalam hal ini semua masalah teknis perencanaan diserahkan oleh pemimpin proyek kepada perencana. Berdasarkan penunjukan pengawas oleh pemimpin proyek, maka seluruh teknis pengawasan diserahkan kepada pengawas. Jika terdapat suatu masalah teknis yang perlu dibicarakan, pemilik proyek tidak dapat berhubungan langsung kepada pelaksana melainkan harus melalui pengawas. Dalam pelaksanaan di lapangan, pengawas memiliki kuasa penuh untuk menegur pelaksana apabila pekerjaan yang dilaksanakannya menyimpang dari ketentuan. Ilustrasi dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Skema Hubungan Kerja Secara Teknis
 Sumber: Data Proyek, 2023

1.5 Lokasi Proyek

Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli – Banda Aceh bagian Seksi 1A berlokasi di Padang tiji – Selimum Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.



Gambar 1. 3 Peta Lokasi Proyek
Sumber: Data Proyek, 2023

1.6 Ruang Lingkup Perusahaan/Industri

Proyek dapat selesai dengan hasil yang maksimal, diperlukan perencanaan yang matang dan masing-masing personil dari kontraktor mengetahui kewajibannya sehingga kelancaran suatu proyek dalam di selesaikan pelaksana dan dapat mengatur langkah-langkah kerja disetiap jenis pekerjaan. Dengan adanya pengaturan langkah-langkah tersebut, maka dapat dibuat rencana kerja berdasarkan metode pengerjaan nya, waktu pelaksanaan, tahapan pekerjaan, jenis pekerjaan, volume pekerjaan yang bertujuan sebagai pengarah tenaga kerja dan peralatan yang dibutuhkan sehingga pemakaian waktu dan bahan serta kualitas pekerjaan yang di hasilkan sesuai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) proyek dapat tercapai.

Secara garis besar PT. Adhi Karya bergerak pada pelaksana jasa konstruksi di bidang :

- a. Bangunan konstruksi
- b. Properti
- c. Real estate
- d. Engineering Procurement Construction (EPC)
- e. Pelaksanaan infrastruktur
- f. Pengadaan barang dan jasa hotel